

MANAJEMAN PERKOTAAN DALAM PEMBANGUNAN PERKOTAAN DI INDONESIA

Oleh **Johny Patta**

Manajemen perkotaan dalam pembangunan perkotaan di Indonesia adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari proses perencanaan yang semakin berkembang sejalan dengan perkembangan pembangunan di Indonesia pada umumnya. Perkembangan tersebut dicirikan, antara lain, oleh perubahan kemampuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sekaligus disertai dengan tekanan-tekanan akibat transformasi sosial ekonomi yang terjadi dan berpengaruh besar dalam pembangunan perkotaan.

Dalam perkembangannya yang paling terakhir, keahlian dalam bidang pengelolaan perkotaan tidak lagi dirasakan perlu hanya untuk maksud-maksud efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya yang ada dan terbatas, tetapi bahkan lebih jauh dari itu yakni untuk mengantisipasi berbagai perubahan struktural yang terjadi sangat cepat dan mengarah pada persaingan yang terbuka, bahkan global, namun sangat berpengaruh terhadap aspek pengelolaan lokal.

Perubahan-perubahan struktural yang sangat penting tersebut, misalnya, adalah meningkatnya peran serta swasta yang semakin nyata dan cenderung menggeser peran pemerintah dalam hal pendanaan pembangunan dan dalam berbagai sektor kegiatan ekonomi.

Secara signifikan, partisipasi swasta yang tidak terikat pada tahun anggaran pemerintah bahkan lebih operasional dalam hal penyediaan sarana dan prasarana perkotaan secara keseluruhan. Perubahan-perubahan struktural pengelolaan perkotaan ini diperkuat lagi dengan minat investasi yang tinggi dari pihak swasta pada sektor-sektor industri, sektor komersial dan sektor finansial. Demikian pula halnya akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dan cenderung bertambah efisien dan kompetitif, lokasi-lokasi perencanaan yang semula tidak menarik untuk kegiatan investasi berubah menjadi lahan yang diperebutkan, misalnya pembangunan di pantai utara Jakarta.

Dari sisi lain, kesadaran masyarakat yang semakin meningkat dan makin kritis untuk turut serta dalam pembangunan perkotaan juga telah memberikan arti semakin pentingnya pengelolaan perkotaan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Kesadaran ini juga membangkitkan semangat pengaturan perkotaan yang lebih adil bagi kepentingan seluruh masyarakat, sehingga peristiwa-peristiwa pengusuran untuk alasan-alasan pembangunan tidak lagi mudah diterapkan.

Sebaliknya usaha penyebaran manfaat pembangunan bagi masyarakat yang tidak mampu semakin dituntut untuk ditingkat-

kan dari waktu ke waktu. Dalam hal ini, pembiayaan dirasakan sebagai masalah yang paling serius khususnya bagi negara berkembang termasuk Indonesia. Alasannya jelas, yaitu akibat tidak cukup tersedianya dana untuk melayani peningkatan kebutuhan penduduk perkotaan akan jumlah dan kualitas fasilitas pelayanan umum yang lebih baik.

Dalam kondisi seperti inilah, tekanan-tekanan yang menyangkut investasi, keinginan otonomi yang lebih besar, peningkatan peran swasta dalam pembiayaan pembangunan, peningkatan peran serta masyarakat, keterbatasan kapasitas dan kemampuan daerah telah memaksa para perumus kebijaksanaan untuk mengambil keputusan guna mereorientasikan pembangunan ke arah pelaksanaan otonomi daerah sepenuhnya yang semakin dititikberatkan kepada daerah tingkat II. Hal ini dibarengi upaya semakin meningkatkan kemampuan daerah dalam bidang perencanaan, pengarahannya, pengoperasian dan pengendalian pembangunan perkotaan atau yang dikenal dengan kemampuan manajemen perkotaan.

Aspek kemampuan implementasi dan evaluasi menjadi bagian penting dalam manajemen perkotaan yang efisien dan efektif karena pengalaman selama ini menunjukkan titik berat kemampuan terlalu berat diarahkan pada kemampuan dalam bidang perencanaannya.

Dalam hal pembiayaan pembangunan perkotaan, maka usaha-usaha terobosan non konvensional menjadi bagian yang semakin penting untuk mengatasi keterbatasan kemampuan pemerintah dalam penyediaan pendanaan. Kerjasama pemerintah-swasta-masyarakat menjadi pilihan yang sangat dipertimbangkan untuk maksud-

maksud pembiayaan di masa yang akan datang.

Namun semuanya itu tentu saja tetap perlu ditempatkan pada suatu kerangka pembangunan perkotaan yang menyeluruh, sehingga pemecahan permasalahan perkotaan yang dihadapi saat ini, kelak tidak menjadi persoalan perkotaan yang semakin berat dan kompleks untuk diatasi. Sebaliknya, manajemen perkotaan dalam pembangunan perkotaan di Indonesia, justru perlu diarahkan pada pengelolaan yang cenderung lebih produktif, efisien dan efektif bagi kepentingan pembangunan perkotaan saat ini dan juga pengembangan kota pada masa-masa yang akan datang.

Hal tersebut, pada gilirannya, akan dapat dicapai bilamana kemampuan sumberdaya manusia dalam bidang keahlian manajemen perkotaan ini dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu, baik ditujukan untuk aparat pemerintah (pusat maupun daerah), pihak swasta maupun menyangkut upaya peningkatan peranserta masyarakat.

Hal ini tentu saja tidak kita ragukan, khususnya dalam menyambut 50 tahun Indonesia Merdeka.